

Jenis Paper (Article, Review.)

Kepentingan dan Pengaruh Stakeholders dalam Manajemen Kolaboratif Kawasan Perairan Teluk Doreri, Manokwari

Stakeholders' Interests and Influence in Collaborative Management of Doreri Bay Waters Area, Manokwari

Fanny Silviany Mawirampakel¹, Roni Bawole², Thomas F. Pattiasina³, Christover Alfarani Bawole⁴, Mudjirahayu Mudjirahayu⁵, Ferawati Runtoboi⁶, Paulus Boli⁷

- ¹ Program Magister Sumberdaya Akuatik, Universitas Papua, Jl. Gunung Salu, Manokwari, Papua Barat. Indonesia 98314;
- ² Program Magister Sumberdaya Akuatik, Universitas Papua, Jl. Gunung Salu, Manokwari, Papua Barat. Indonesia 98314; Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia. 98314;
- ³ Program Magister Sumberdaya Akuatik, Universitas Papua, Jl. Gunung Salu, Manokwari, Papua Barat. Indonesia 98314; Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia. 98314
- ⁴ Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Papua, Jl. Gunung Salu, Manokwari, Papua Barat. Indonesia 98314;
- ⁵ Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia. 98314
- ⁶ Program Magister Sumberdaya Akuatik, Universitas Papua, Jl. Gunung Salu, Manokwari, Papua Barat. Indonesia 98314; 2 Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia. 98314;
- ⁷ Program Magister Sumberdaya Akuatik, Universitas Papua, Jl. Gunung Salu, Manokwari, Papua Barat. Indonesia 98314; Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia. 98314

PEER Review Process

Disubmit: 15/06/2025
Direview: 19/06/2025
Direvisi: 29/06/2025
Diterima: 01/07/2025
Diterbitkan: 10/08/2025

Doi:

10.64283/jotdiverse.2025.1(2):11
Sitasi: Mawirampakel, F. S., Bawole, R., Pattiasina, T. F., Bawole, C. A., Mudjirahayu, M., Runtoboi, F., & Boli, P. (2026). Stakeholders' Interests and Influence in Collaborative Management of Doreri Bay Waters Area, Manokwari. *Journal of Tropical Diversity*, 1(2), 90-98., doi: [https://doi.org/10.64283/jotdiverse.2025.1\(2\):11](https://doi.org/10.64283/jotdiverse.2025.1(2):11)



Copyright: © 2025 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Abstrak: Stakeholders atau pemangku kepentingan merupakan komponen penting dalam kegiatan pengelolaan wilayah dan sumberdaya pesisir. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh para pemangku kepentingan dalam manajemen kolaborasi Kawasan Perairan Teluk Doreri. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, diskusi kelompok terfokus, dan kuesioner yang dilaksanakan pada Februari-Maret 2025. Sebanyak 41 informan kunci yang mewakili berbagai kelompok termasuk instansi pemerintah, komunitas lokal, akademisi, sektor swasta, dan lembaga swadaya Masyarakat dilibatkan untuk menilai tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap pengelolaan kawasan perairan Teluk Doreri. Analisis stakeholders telah memetakan posisi stakeholders, yang menunjukkan bahwa mayoritas pemangku kepentingan berada pada Kuadran II (key players), artinya kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam praktek-praktek manajemen kolaboratif. Di sisi lain, Kuadran I dan IV masing-masing hanya diisi oleh satu aktor yang memiliki ketimpangan antara komitmen dan kapasitas pengaruh. Sementara itu, Kuadran III mencerminkan keberadaan stakeholders dengan pengaruh rendah namun berpotensi strategis secara sosial, seperti tokoh agama, akademisi, dan kepala kampung. Pemetaan ini mengindikasikan pentingnya pemberdayaan lintas kuadran, serta perlunya strategi manajemen kolaboratif yang menjembatani kesenjangan relasi kekuasaan dan memastikan inklusivitas dalam perencanaan dan implementasi manajemen kolaboratif

Kata kunci: pemangku kepentingan; kepentingan, pengaruh, manajemen kolaboratif; Teluk Doreri.

1. Pendahuluan

Rendahnya tingkat pencapaian manajemen kolaboratif sering kali disebabkan oleh kegagalan dalam pengambilan mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh Stakeholders, dimana keputusan mereka diimplementasikan dengan hasil yang tidak memuaskan (Bawole, 2012; Evans et al., 2011). Dalam skala yang lebih luas, para

pengambil keputusan kerap gagal memperhatikan dan mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Studi kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam proses pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam manajemen kolaboratif (Bawole, 2012).

Analisis pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam memahami proses kegiatan yang sedang berlangsung, karena peningkatan hubungan antara institusi yang berkepentingan tidak dapat dihindari. Analisis ini menjadi instrumen yang baik dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi melalui kerja sama dan alokasi peran pemangku kepentingan. Selain itu, analisis pemangku kepentingan sangat penting dalam menciptakan manajemen yang efektif, tata kelola yang baik, dan pemahaman hubungan antar pengguna kawasan perairan Teluk Doreri.

Manajemen kawasan perairan Teluk Doreri laut di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat, menghadapi tantangan signifikan. Peningkatan aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk telah memberikan tekanan pada ekosistem pesisir, termasuk degradasi terumbu karang dan perubahan garis pantai (Purba et al., 2023). Analisis spasial menunjukkan variasi potensi ketahanan relatif ekosistem terumbu karang di Teluk Doreri, dengan beberapa lokasi menunjukkan potensi ketahanan yang tinggi, terutama di sekitar Pulau Lemon dan Pulau Mansinam (Pattiasina et al., 2018). Namun, lokasi-lokasi lain menunjukkan potensi ketahanan yang rendah, dan memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan.

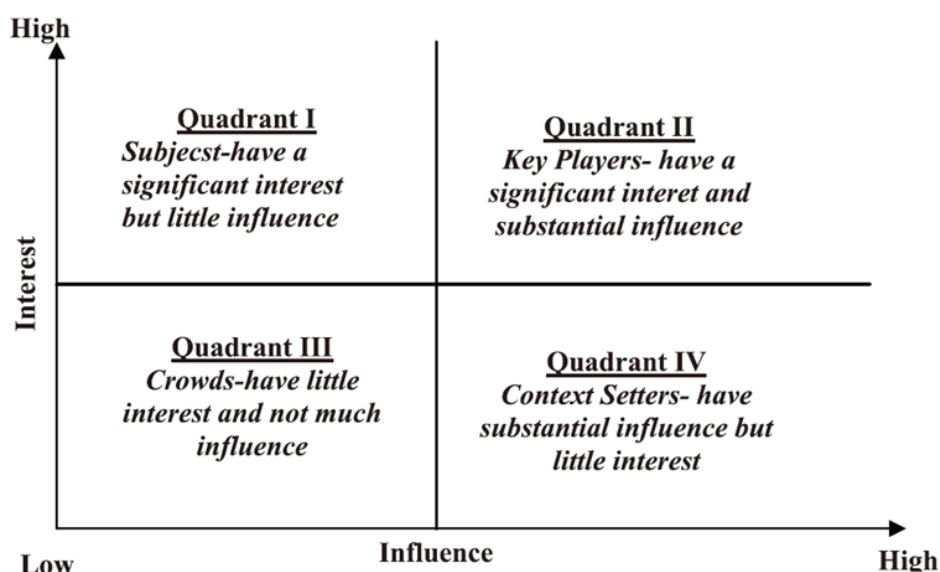
Konflik dalam pengelolaan sumber daya pesisir sering kali muncul antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Studi menunjukkan bahwa konflik ini dapat diatasi melalui pendekatan manajemen kolaboratif yang melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan (Stepanova, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh pemangku kepentingan di kawasan laut Teluk Doreri.

2. Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2025 di kawasan laut Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan kuesioner yang ditujukan kepada pemangku kepentingan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Sebanyak 41 informan kunci terlibat, mewakili berbagai tingkat pemerintahan, masyarakat lokal, serta institusi yang relevan dengan pengelolaan sumber daya pesisir.

Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis pemangku kepentingan mengacu pada (Bryson et al., 2011; Bryson & Quinn Patton, 2015) dan (Reed et al., 2009), melalui tiga tahap utama: identifikasi aktor dan kepentingan/pengaruhnya, klasifikasi aktor, serta pemetaan relasi antar pemangku kepentingan. Enam kategori utama yang teridentifikasi meliputi: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi hingga desa), komunitas lokal, LSM, akademisi, dan sektor swasta. Setiap aktor memberikan skor terhadap 12 indikator pengelolaan berdasarkan skala kepentingan dan pengaruh (skala Likert lima), yang kemudian dirangkum dalam matriks dua dimensi.

Hasil pemetaan menunjukkan posisi pemangku kepentingan dalam empat kuadran: *key players*, *subjects*, *context setters*, dan *crowd* (Gambar 1) Posisi ini mencerminkan kapasitas relatif mereka dalam memengaruhi keberlanjutan pengelolaan. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan untuk menelaah sumber dan bentuk konflik yang muncul, serta merumuskan strategi penyelesaian yang berbasis kolaborasi. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan strategi tata kelola adaptif dengan mempertimbangkan relasi kuasa dan tingkat kepentingan setiap aktor terhadap keberlanjutan kawasan Teluk Doreri.



Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan dalam Analisis Pemangku Kepentingan (Bryson et al., 2011; Bryson and Quinn Patton, 2015) dan (M. S. Reed et al., 2009)

Pembagian kelompok pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan laut Teluk Doreri didasarkan pada tingkat kewenangan, peran fungsional, dan kapasitas pengaruh masing-masing aktor dalam konteks tata kelola sumber daya pesisir. Pemerintah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pemerintah nasional (seperti Polres Manokwari), pemerintah provinsi (misalnya Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat), serta pemerintah kabupaten (termasuk dinas teknis dan distrik). Kelompok komunitas mencakup aktor-aktor berbasis lokal yang memiliki keterikatan langsung dengan wilayah, seperti tokoh agama, nelayan, dan kepala kampung, yang umumnya memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh institusional yang terbatas. Lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGOs) diposisikan sebagai aktor non-pemerintah yang mendorong advokasi dan fasilitasi. Akademisi berperan sebagai penyedia data, analisis ilmiah, serta pengetahuan teknis, sementara sektor swasta—seperti hotel, restoran, dan pelaku usaha—berkontribusi terhadap dinamika ekonomi dan pemanfaatan kawasan. Klasifikasi ini membantu dalam pemetaan kepentingan dan pengaruh, serta memudahkan perumusan strategi kolaboratif dalam pengelolaan kawasan secara partisipatif dan berkelanjutan.

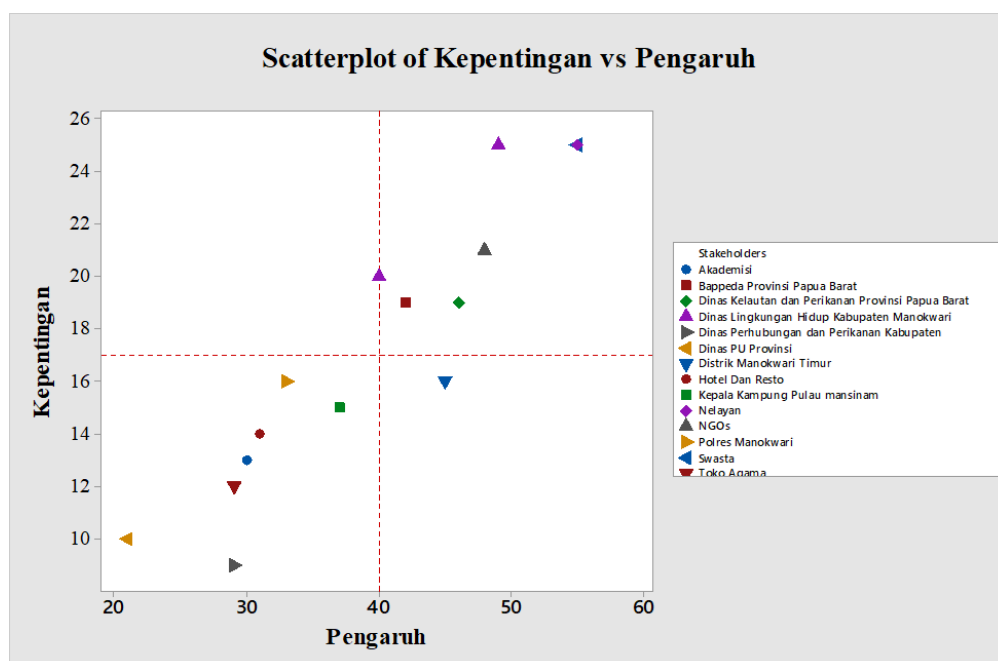
3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepentingan dan Pengaruh Stakeholders

Analisis pemangku kepentingan merupakan pendekatan sistematis untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan berdasarkan dua atribut utama, yaitu tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) (Bryson et al., 2011; Bryson and Quinn Patton, 2015) dan (Reed et al., 2009)). Dalam konteks pengelolaan Zona Pemanfaatan Teluk Doreri, pendekatan ini digunakan untuk memahami relasi kekuasaan, kepedulian, serta potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kepentingan diletakkan pada sumbu vertikal (Y), sedangkan pengaruh berada pada sumbu horizontal (X), membentuk empat kuadran analisis yang menggambarkan posisi relatif tiap aktor dalam sistem sosial-ekologis. Sebanyak 15 kelompok pemangku kepentingan telah dianalisis dan dipetakan dalam ruang dua dimensi, yang menghasilkan pola sebaran data yang cukup konsisten (Gambar 2)

Sebaran titik data membentuk pola diagonal yang merepresentasikan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, hingga posisi kelompok nelayan dan sektor swasta. Pola ini mengindikasikan adanya hubungan linier positif antara tingkat *interest* dan *influence*, di mana semakin besar kepentingan suatu aktor, cenderung diiringi dengan peningkatan pengaruhnya terhadap pengelolaan kawasan. Temuan ini selaras dengan literatur sebelumnya yang menekankan pentingnya keselarasan antara kepentingan substantif

dan kapasitas pengaruh dalam pengelolaan sumber daya bersama (Grimble & Wellard, 1997; Reed et al., 2020).



Gambar 2. Pemetaan Kepentingan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Perairan Teluk Doreri

Kepadatan sebaran data paling dominan ditemukan pada Kuadran II (*key players*) dan Kuadran III (*crowd*). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan berada pada dua kutub keterlibatan, yaitu sangat aktif dalam proses pengambilan keputusan atau justru pasif dengan keterlibatan yang sangat terbatas. Kuadran II diisi oleh aktor-aktor strategis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, dan sejumlah LSM yang memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan serta pelaksanaan operasional kawasan. Sementara itu, Kuadran III menunjukkan keberadaan kelompok dengan *interest* dan *influence* yang rendah, di antaranya adalah pelaku usaha kecil dan sebagian komunitas lokal yang masih perlu difasilitasi untuk meningkatkan keterlibatannya.

Sebaran data paling sedikit ditemukan pada Kuadran I dan Kuadran IV. Pada Kuadran I, hanya terdapat satu pemangku kepentingan, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi, yang menempati posisi dengan nilai *interest* tinggi (20) namun *influence* sedang (40). Posisi ini menunjukkan aktor yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan kawasan, tetapi belum didukung oleh kapasitas kelembagaan maupun otoritas yang memadai untuk mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Kuadran IV ditempati oleh satu aktor, yakni Distrik Manokwari Timur, yang memiliki tingkat *influence* struktural relatif tinggi, namun menunjukkan tingkat *interest* yang rendah dalam isu pengelolaan.

Konfigurasi ini menandakan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang bersifat adaptif dan diferensial, dengan mempertimbangkan secara spesifik posisi serta peran masing-masing pemangku kepentingan dalam kerangka matriks *interest-influence*. Pengelolaan kawasan yang berkelanjutan menuntut keterlibatan semua aktor, termasuk mereka yang saat ini berada di posisi marginal, agar tercipta tata kelola yang inklusif, responsif, dan kontekstual sesuai dengan kompleksitas sistem sosial-ekologis yang ada.

3.2 Pola sebaran

3.2.1 Kuadran I

Dalam analisis pemangku kepentingan pengelolaan Teluk Doreri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manokwari menempati posisi unik dalam Kuadran I pada matriks *interest-influence*. Posisi ini menunjukkan bahwa DLH

memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap pelestarian dan keberlanjutan Kawasan Perairan Teluk Doreri, namun memiliki pengaruh yang relatif rendah dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini sering kali mencerminkan keterbatasan struktural, baik dari sisi regulasi maupun kapasitas koordinasi lintas sektor, yang menyebabkan kontribusi teknis mereka tidak sepenuhnya terakomodasi dalam forum tata kelola kawasan konservasi (Reed et al., 2009). Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Manokwari. Studi oleh (Kartika et al., 2019) mengenai tata kelola wisata kuliner Payung di Kota Batu menunjukkan bahwa DLH Kota Batu juga menempati Kuadran I. Meskipun memiliki komitmen kuat terhadap kualitas lingkungan dan pengendalian dampak, DLH tidak memiliki kapasitas formal untuk memengaruhi proses perencanaan AMDAL dan pengelolaan kawasan wisata secara langsung. Posisi ini memperlihatkan tantangan klasik dari aktor teknis yang memiliki kepentingan substantif tetapi tidak memiliki daya tawar kelembagaan dalam struktur pemerintahan daerah

3.2.2 Kuadran II

Dalam kerangka analisis pemangku kepentingan pengelolaan Teluk Doreri, Kuadran II—yang merepresentasikan aktor dengan tingkat interest dan influence yang tinggi dihuni oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis. Mereka adalah Bappeda Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat, lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organizations (LSM/NGOs), serta kelompok swasta dan nelayan yang mencatatkan titik plotting tertinggi. Aktor-aktor dalam Kuadran II secara fungsional merupakan pilar utama dalam sistem pengelolaan kawasan Teluk Doreri. Bappeda Provinsi berperan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk integrasi kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir ke dalam rencana strategis lintas sektor. DKP Provinsi, sebagai otoritas teknis, memegang tanggung jawab atas pemberian izin usaha perikanan, pengawasan pemanfaatan sumber daya, serta penguatan kapasitas kelembagaan kelautan dan pesisir. LSM memainkan peran fasilitator dalam advokasi konservasi dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi jembatan antara kebijakan formal pemerintah dan kebutuhan komunitas akar rumput. Sementara itu, swasta dan nelayan menempati posisi yang sangat sentral karena mereka adalah pengguna langsung sumber daya laut, dan sekaligus pihak yang paling terdampak serta berpotensi besar dalam mempraktikkan prinsip-prinsip keberlanjutan di lapangan. Fenomena serupa juga ditemukan di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, di mana studi oleh (Suparyana et al., (2023) menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Banten, komunitas nelayan, serta pelaku wisata lokal juga menempati posisi *key players*. Keberhasilan pengelolaan TNUK tidak lepas dari sinergi antara otoritas pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta yang membentuk sistem tata kelola kolaboratif dan berbasis partisipasi

Reed et al., (2009) menyatakan bahwa pemangku kepentingan dengan tingkat interest dan influence tinggi merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Penelitian ini juga menegaskan bahwa aktor-aktor yang berada di Kuadran II harus menjadi fokus dalam proses pelibatan aktif, pembagian peran strategis, dan penguatan kapasitas institusional. Dari konfigurasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan aktor dalam Kuadran II mencerminkan struktur pengelolaan yang kondusif terhadap pendekatan kolaboratif. Ketika perencana kebijakan, otoritas teknis, lembaga advokasi, dan pengguna langsung sumber daya berada dalam satu ruang koordinatif dengan kepentingan dan pengaruh yang seimbang, maka fondasi menuju tata kelola yang efektif dan berkelanjutan telah terbentuk. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa penguatan hubungan antar-aktor di Kuadran II perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan, karena merekalah yang berpotensi memimpin transformasi menuju konservasi laut yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

3.2.3 Kuadran III

Dalam konteks analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) pengelolaan Zona Pemanfaatan Teluk Doreri, Kuadran III mengacu pada kelompok aktor yang menunjukkan tingkat *interest* (kepentingan) dan *influence* (pengaruh) yang relatif rendah terhadap proses tata kelola kawasan. Aktor-aktor yang menempati posisi ini meliputi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten, Tokoh Agama, akademisi, sektor hotel dan restoran, Kepala Kampung Pulau Mansinam, serta

Polres Manokwari. Meskipun peran mereka dalam pengambilan keputusan bersifat marginal, keberadaan kelompok ini tetap memiliki signifikansi strategis, khususnya dalam mendukung aspek-aspek tertentu dari keberlanjutan sosial dan kelembagaan pengelolaan kawasan.

Beberapa dari aktor ini memiliki fungsi normatif dan sosial yang kuat di tingkat lokal—seperti tokoh agama dan kepala kampung—yang berpotensi mempengaruhi legitimasi sosial terhadap kebijakan konservasi apabila diberdayakan dengan pendekatan yang tepat. Sebagaimana disarankan oleh Anastasi, (2018), aktor dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah sebaiknya tidak diabaikan, melainkan dimonitor secara berkala karena peran mereka dapat berubah seiring dinamika politik, kelembagaan, dan sosial. Monitoring ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan pergeseran posisi aktor-aktor tersebut ke kuadran yang lebih signifikan, sehingga dapat mendorong inklusivitas dan adaptabilitas dalam sistem tata kelola kawasan laut.

Sebagai contoh, dalam pengelolaan kawasan konservasi di daerah lain seperti Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) (Suparyana et al., 2023), ditemukan dinamika serupa di mana sejumlah pemangku kepentingan awalnya berada dalam Kuadran III karena tingkat interest dan influence yang rendah. Aktor-aktor tersebut meliputi lembaga teknis sektoral, perwakilan masyarakat adat, serta pelaku usaha kecil menengah yang belum terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program konservasi. Namun, studi oleh Suparyana et al., (2023) menunjukkan bahwa dengan penerapan strategi pemberdayaan yang terstruktur—meliputi pelatihan berbasis peran, integrasi kelembagaan lokal, serta peningkatan kapasitas komunikasi antar-pemangku kepentingan—posisi mereka secara perlahan bergeser menuju Kuadran II dan bahkan Kuadran I dalam beberapa kasus. Pendekatan ini terbukti memperkuat fungsi representatif dan kontribusi teknis mereka terhadap keberlanjutan tata kelola kawasan. Hal tersebut diperkuat oleh temuan (Reed et al., 2009), yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan dalam Kuadran III tidak boleh diabaikan, karena dengan intervensi yang tepat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang signifikan, terutama dalam konteks sosial-ekologis yang kompleks. Penguatan peran ini juga menghasilkan peningkatan legitimasi sosial terhadap kebijakan konservasi serta memperluas dukungan masyarakat terhadap larangan eksploitasi sumber daya di zona inti.

3.2.4 Kuadran IV

Distrik Manokwari Timur menempati Kuadran IV, yaitu kategori pemangku kepentingan dengan tingkat *influence* (pengaruh) tinggi namun *interest* (kepentingan) relatif rendah. Posisi ini secara konseptual dikategorikan sebagai *context setters*, yakni aktor yang memiliki kemampuan struktural dan kelembagaan untuk memengaruhi keputusan strategis, namun tidak menunjukkan keterlibatan langsung atau perhatian substansial terhadap isu konservasi laut. Dalam konteks ini, Distrik Manokwari Timur berperan sebagai pemegang otoritas administratif yang secara formal dapat menentukan arah kebijakan lokal, tetapi belum secara aktif terlibat dalam isu-isu keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Fenomena serupa juga tercatat dalam studi pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Bunaken, di mana aparat kecamatan dan perangkat wilayah administratif lainnya menempati posisi dengan *influence* tinggi—khususnya dalam hal otorisasi kegiatan pembangunan, penerbitan rekomendasi teknis, serta pengendalian tata ruang kawasan. Namun, aktor-aktor ini tidak menunjukkan *interest* yang sebanding terhadap upaya pelestarian ekosistem laut. Ketidakseimbangan antara pengaruh struktural dan kepedulian ekologis tersebut menyebabkan celah kebijakan dalam implementasi konservasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dari pemerintah tingkat menengah menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas zonasi taman nasional, lemahnya pengawasan, serta meningkatnya konflik antar-pemanfaatan sumber daya. Di samping itu perlu digarisbawahi bahwa ketidakterlibatan ini bukan semata disebabkan oleh sikap abai, tetapi sering kali terkait dengan kurangnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan informasi teknis mengenai nilai ekologis kawasan, serta belum adanya integrasi pengelolaan sumberdaya dalam rencana pembangunan daerah secara sistematis. Dalam konteks tersebut, aktor-aktor administratif semisal kecamatan berfungsi sebagai *context setters* yang menentukan apakah kebijakan pengelolaan dapat dijalankan secara operasional atau justru terhambat oleh kebijakan pembangunan yang kontra-produktif.

4. Kesimpulan

Analisis pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Teluk Doreri menunjukkan bahwa keterlibatan aktor dalam sistem sosial-ekologis sangat dipengaruhi oleh tingkat keselarasan antara kepentingan dan pengaruh yang dimiliki. Dominasi aktor pada Kuadran II dan III mengindikasikan perlunya strategi penguatan kelembagaan bagi aktor kunci serta fasilitasi partisipasi bagi kelompok yang masih termarginalkan. Keberadaan aktor tunggal di Kuadran I dan IV menyoroti pentingnya pendekatan pemberdayaan yang kontekstual untuk memastikan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan maupun kapasitas kelembagaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, tata kelola kawasan Teluk Doreri yang efektif dan berkeadilan hanya dapat terwujud melalui integrasi peran lintas kuadran yang responsif terhadap dinamika dan keragaman pemangku kepentingan.

Berdasarkan distribusi aktor dalam keempat kuadran analisis Stakeholders, pengelolaan perairan Teluk Doreri menghadapi tantangan yang kompleks akibat ketimpangan antara kepentingan dan pengaruh antar pemangku kepentingan. Kuadran I diisi oleh aktor teknis seperti DLH yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perairan Teluk Doreri namun tidak cukup kuat secara kelembagaan, sementara Kuadran II menampilkan aktor-aktor strategis seperti DKP, Bappeda, LSM, dan kelompok pengguna langsung yang menjadi penggerak utama tata kelola kawasan. Di sisi lain, Kuadran III dihuni oleh aktor-aktor dengan legitimasi sosial namun minim pengaruh formal, sedangkan Kuadran IV memperlihatkan adanya pengaruh administratif signifikan tanpa dukungan kepedulian ekologis yang memadai. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kawasan Teluk Doreri laut tidak hanya bergantung pada kekuatan regulatif atau teknokratis, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk menyinergikan aktor-aktor dengan fungsi sosial, administratif, dan ekologis secara kolaboratif dan setara.

Keseluruhan dinamika pemangku kepentingan dalam pengelolaan perairan Teluk Doreri memperlihatkan bahwa tantangan utama terletak pada ketimpangan peran, kepentingan, dan pengaruh antar aktor yang tersebar di keempat kuadran analisis. Ketidakterlibatan aktor struktural seperti distrik, lemahnya posisi teknis kelembagaan seperti DLH, serta minimnya representasi sosial dari kelompok akar rumput berpotensi memicu konflik kelembagaan dan sosial yang laten. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola Teluk Doreri kawasan ini sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun sistem kolaboratif yang menjembatani kepentingan lintas aktor, memperkuat kapasitas institusional dan sosial, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan adaptif.

5. Ucapan Terimakasih Jika Ada

Ucapan terima kasih ditujukan kepada individu, lembaga dan masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anastasi, C. (2018). *Strategic stakeholder engagement*. Routledge.
- Bawole, R. (2012a). Analysis and Mapping of Stakeholders in Traditional Use Zone within Marine Protected Area. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 18(2), 110–117. <https://doi.org/10.7226/jtfm.18.2.110>
- Bawole, R. (2012b). Manajemen kolaboratif zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
- Bryson, J. M., Quinn, M., & Bowman, R. A. (2011). Working with evaluation stakeholders: A rationale, step-wise approach and toolkit. *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2010.07.001>
- Bryson, J. M., & Quinn Patton, M. (2015). Analyzing and engaging stakeholders. *Handbook of Practical Program Evaluation*, 36–61.
- Evans, L., Cherrett, N., & Pems, D. (2011). Assessing the impact of fisheries co-management interventions in developing countries: A meta-analysis. 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.03.010>

- Grimble, R., & Wellard, K. (1997). Stakeholder methodologies in natural resource management: a review of principles, contexts, experiences and opportunities. *Agricultural Systems*, 55(2), 173-193. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-521X\(97\)00006-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-521X(97)00006-1)
- Kartika, A. P., Sari, N., & Dinanti, D. (2019). ANALISIS STAKEHOLDER PENGELOLAAN WISATA KULINER PAYUNG KOTA BATU. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 8(1), 57-64.
- Pattiasina, T. F., Sartimbul, A., Semedi, B., Herawati, E. Y., Pelasula, D. D., Krey, M., & Mulyadi. (2018). Spatial assessment of relative resilience potential to support management of coral reef ecosystem in Doreri Bay area, Manokwari Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 162(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/162/1/012032>
- Purba, G. Y. S., Eramuri, Y. I., Loinenak, F. A., Matulessi, M., & Manumpil, A. W. (2023). Coastline change at Manokwari coastal, West Papua Indonesia during two decades (1999-2020). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1192(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1192/1/012040>
- Reed, J. R., Lombard, A. T., & Sink, K. J. (2020). A diversity of spatial management instruments can support integration of fisheries management and marine spatial planning. *Marine Policy*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104089>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who ' s in and why ? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. 90, 1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Stepanova, O. (2015). Conflict resolution in coastal resource management: Comparative analysis of case studies from four European countries. *Ocean and Coastal Management*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.10.017>
- Suparyana, S., Fauzi, A., Kusumastanto, T., Yulianto, G., & Yusuf, M. (2023). Analysis of Key Actors in the Sustainable Management of Marine Protected Areas in Ujung Kulon National Park. *Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*, 010(02). <https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2023.010.02.01>